

Selasa, 22 Oktober 2024

FM-CC-AAJI-006-00

Judul	AAJI Sebut Aksi Bajak-membajak Aktuaris Asuransi Jiwa Sangat Jarang Terjadi
Nama Media	kontan.co.id
Newstrend	AAJI Tanggapi Kondisi SDM Aktuaris di Industri Asuransi Jiwa
Halaman/URL	https://keuangan.kontan.co.id/news/aaji-sebut-aksi-bajak-membajak-aktuaris-asuransi-jiwa-sangat-jarang-terjadi
Tanggal Berita	21/10/2024
Sentimen	positive

AAJI Sebut Aksi Bajak-membajak Aktuaris Asuransi Jiwa Sangat Jarang Terjadi

Senin, 21 Oktober 2024 / 10:02 WIB



Dok/Allianz Indonesia

ILUSTRASI: AAJI bilang aksi bajak-membajak aktuaris di industri asuransi jiwa sangat jarang terjadi.

Judul	Literasi Asuransi Masyarakat Meningkatkan
Nama Media	Media Indonesia
Newstrend	Great Eastern Life dan CIMB Niaga Luncurkan Produk GREAT Prestige Optima Protector
Halaman/URL	Pg7
Tanggal Berita	22/10/2024
Sentimen	positive

Literasi Asuransi Masyarakat Meningkatkan

MINAT dan pemahaman masyarakat Indonesia dalam menumbuhkan aset serta merencanakan masa depan cenderung meningkat. Hal itu telah dibuktikan lewat indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia pada 2024 yang mencapai 65,43% atau meningkat 15,75% jika dibandingkan dengan periode survei sebelumnya pada 2022. Peningkatan itu menandakan semakin banyaknya masyarakat yang sudah terliterasi akan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik.

Sejalan dengan indeks literasi tersebut, hasil OCBC Financial Fitness Index (FFI) 2024 yang dirilis oleh OCBC bekerja sama dengan NielsenIQ menunjukkan, pada tahun 2024 skor *financial fitness* masyarakat Indonesia berhasil stabil pada angka 41,25%.

Ada kenaikan signifikan dari 25% generasi milenial yang kini sudah mulai memiliki dana darurat untuk ketenangan hidup di masa depan atau di masa pensiun.

"Adanya tren peningkatan minat atau kesadaran akan perencanaan dana darurat atau pensiun, khususnya di kalangan masyarakat milenial. Hal ini menjadi peluang besar bagi para perusahaan penyedia jasa keuangan," kata Sisca, Direktur Bancassurance Great Eastern Life Indonesia dalam keterangan tertulisnya.

Bertepatan dengan Bulan Inklusi Keuangan pada Oktober ini, Great Eastern Life Indonesia

bersama mitra strategisnya PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) meluncurkan produk inovatif baru *GREAT Prestige Optima Protector*. Produk itu dinilai dapat menjadi solusi konkret bagi masyarakat merealisasikan tujuan keuangan.

Sisca menjelaskan, *GREAT Prestige Optima Protector* merupakan produk asuransi jiwa dalam mata uang Rupiah yang dirancang untuk masyarakat yang menginginkan pertumbuhan aset dengan cepat.

"Great Eastern Life Indonesia memberikan kepastian tingkat imbal hasil yang dijamin tetap selama 3 atau 5 tahun. Keunggulan ini bisa membantu masyarakat yang ingin mengembangkan aset dan meraih aspirasinya dengan lebih cepat dalam kurun waktu 3 atau 5 tahun, tergantung pada pilihan dan kebutuhan nasabah," tuturnya.

"Sebagai mitra, Great Eastern dan OCBC memberikan opsi kepada nasabah untuk memiliki perlindungan dan instrumen investasi, yang tentunya disesuaikan dengan aspirasi keuangan yang dimiliki oleh tiap individu," tambah Juky Mariska, Wealth Management Division Head OCBC.

Ketua Dewan Asuransi Indonesia (DAI) Yulius Bhayangkara dalam kesempatan berbeda menyebukan kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi semakin menguatkan perekonomian Indonesia. (RO/E-2)

Judul	Aspek Hukum dalam Fraud Terkait POJK No.12/2024
Nama Media	Ekonomi Neraca
Newstrend	OJK Kenakan Sanksi PKU Kepada Jiwasraya dan Berdikari Insurance
Halaman/URL	Pg2
Tanggal Berita	22/10/2024
Sentimen	neutral

Aspek Hukum dalam Fraud Terkait POJK No.12/2024

Oleh: Dr. Wirawan B. Ilyas, CPA.,BKP, Advokat dan Akuntan Forensik

Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 12 Tahun 2024 tentang Strategi Anti Fraud bagi lembaga jasa keuangan sesungguhnya tidak mengejutkan. Mengapa? karena berbagai bentuk fraud yang terjadi di lingkungan BUMN, perusahaan industri dibawah pengawasan OJK sudah berlangsung sejak lama dengan nilai fraud yang sangat fantastis, bahkan dampak buruknya masih dirasakan oleh masyarakat, seperti kasus PT Asuransi Jiwasraya, PT Asabri, PT Taspen dan lain-lain.

Padahal jika OJK memiliki sistem yang canggih tentu upaya preventive, detective dan corrective dapat dilakukan sedini mungkin, apalagi OJK memiliki infrastruktur, peralatan dan kewenangan hukum yang diberikan Undang-undang, terakhir terbitnya UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) yang memberikan kewenangan luas bagi OJK, termasuk melakukan penyidikan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat konsumen.

Akibat fraud yang dilakukan oleh pelaku usaha dan dibarengi oleh kelalaian OJK dalam melakukan pengawasan berupa pencegahan sesungguhnya tidak dapat diterima akal sehat hukum. Fakta empiris membuktikan berbagai kasus fraud terus menerus terjadi.

Konstitusi mengamanatkan bahwa negara mempunyai kewaja-

iban melindungi masyarakat (konsumen). Publik pun menilai lemahnya fungsi pengawasan OJK padahal pelaku usaha sudah diwajibkan menyampaikan laporan keuangan secara berkala, bahkan OJK punya kewenangan meminta data, informasi dan keterangan lebih lanjut, jika dari laporan keuangan yang disampaikan masih memerlukan pendalaman.

Mengacu pada UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terdapat beberapa asas hukum, antara lain asas kepastian hukum, kepentingan hukum, pelajaran yang baik, kepercayaan dan menanggapi pengharapan yang wajar.

Dari asas-asas tersebut harusnya OJK menjalankan fungsi pencegahan agar tidak terjadi dampak yang merugikan masyarakat konsumen. Begitulah hakikat perlindungan terhadap masyarakat konsumen oleh negara.

Strategi Anti Fraud

Sebagai perusahaan publik yang menyangkut kepentingan publik, seharusnya semua perangkat OJK mampu memastikan bahwa kepentingan publik terjaga, bahkan terjamin.

Itulah sesungguhnya fungsi lembaga pemerintahan/negara jika mengacu pada teori kontrak sosial, negara berkewajiban melindungi masyarakat dan masyarakat berkewajiban membayar pajak (asas timbal balik). Hal inilah yang harus dipahami oleh OJK, agar terciptanya *public trust* ter-

hadap OJK. Maraknya dugaan fraud yang terjadi pada beberapa perusahaan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan jasa keuangan yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seharusnya menjadi perhatian serius dan segera mengambil langkah kongkrit pembenahan, baik oleh Dewan Komisiner OJK maupun Menteri BUMN. Mengapa? karena fraud yang terjadi selama ini berimplikasi terhadap kepercayaan publik dan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.

Konsep Hukum Fraud

Ketika bicara fraud makna yang muncul dalam pembicaraan sehari-hari kerap diartikan sebagai penipuan, kecurangan atau penggelapan.

Kata curang itu sendiri dalam Kamus Bahasa Indonesia dimaknai sebagai tidak jujur, tidak lurus hati, tidak adil. Kalau ada orang berbuat curang, berarti sudah berbuat tidak jujur, menipu, menyalahi, dengan kata lain yang sifatnya merugikan pihak lain.

Peripuan itu sendiri dapat dimaknai sebagai segala bentuk kecurangan, yang dapat dilakukan oleh orang atau perusahaan.

Dari sisi hukum, patut dipahami bagaimana hukum menilai suatu perbuatan fraud, termasuk segala akibat hukumnya jika fraud dibawa ke ranah hukum. Paling mudah dipahami dari kata fraud adalah tindakan yang digolongkan

sebagai korupsi (*corruption*), khususnya terkait dengan perbuatan yang digolongkan sebagai gratifikasi maupun suap yang muncul dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya Pasal 12B.

Bahkan, peraturan terkait fraud juga muncul dalam UU lain seperti dalam KUHP yang merumuskan beragam rumusan tindak pidana materiil yang bersinggungan dengan persoalan kecurangan, seperti diatur dalam ketentuan Pasal 209 terkait penyuaian, Pasal 263 terkait pemalsuan surat, Pasal 362 terkait pencurian, Pasal 368 terkait pemerasan, Pasal 372 terkait penggelapan, Pasal 378 terkait penipuan.

Lalu, dalam KUHPA juga muncul ketentuan-ketentuan yang mengatur tata cara mengadili dan menetapkan seseorang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP.

Bicara fraud (kecurangan) pada esensinya merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau dari luar organisasi, dengan maksud mendapatkan keuntungan bagi pribadi atau kelompoknya, yang secara langsung merugikan pihak lain.

Perbuatan melawan hukum itu tidak melulu terjadi karena melanggar pasal-pasal yang diatur dalam UU melainkan melingkupi setiap pelanggaran terhadap ke-susilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup dalam ma-

sarakat (H.Muchsin, 2006). Fraud (kecurangan) yang paling mudah dipahami adalah jika kita amatik kejadian yang terjadi pada beberapa BUMN antara lain kasus PT Wijaya Karya, Tbk, PT Waskita Karya, Tbk, PT Garuda Indonesia, Tbk (untuk tahun buku 2018), PT Indofarma, Tbk dan juga pada badai usaha swasta antara lain SNP Finance, PT Tiga Pilar, Tbk, yang disebabkan adanya perbuatan internal perusahaan (Direksi) diketahui melakukan dugaan fraud (kecurangan) pada laporan keuangan atau menyembunyikan, menyamarkan perbuatan fraud tersebut dalam laporan keuangan.

Artinya, data yang tercantum dalam laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Kecurangan dimaksud sengaja dilakukan manajemen untuk memperoleh keuntungan pribadi dan orang lain yang tentu saja akan memberi kerugian bagi investor maupun kreditor.

Iromisnya Dewan Komisaris yang berfungsi melakukan pengawasan justru membiarkan atau justru ikut dalam perbuatan melawan hukum tersebut. Adatiga kemungkinan.

Pertama, Anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai kompetensi yang handal terkait dengan fraud. Kedua, mempunyai kompetensi, tetapi bersikap pasif, sehingga membiarkan saja. Ketiga, terlibat sebagai peserta dalam perbuatan fraud tersebut.

Judul	BRI Life Spin-off Unit Syariah
Nama Media	Jawa Pos
Newstrend	Spin Off UUS BRI Life
Halaman/URL	Pg5
Tanggal Berita	22/10/2024
Sentimen	positive

BRI Life Spin-off Unit Syariah

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui pemisahan (*spin-off*) unit syariah Asuransi BRI Life. Perseroan pun berencana melanjutkan bisnis unit syariah dengan mendirikan perusahaan baru.

"*Spin-off* ini rencananya akan dilaksanakan sesuai dengan keputusan OJK, dimulai pada rentang waktu Januari 2026 sampai dengan September 2026," ucap Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto, kemarin (21/10).

Menurut dia, pemisahan unit usaha syariah diperlukan untuk memberikan peluang untuk tumbuh. Sekaligus menjawab tan-

tangan bagi perkembangan industri asuransi syariah ke depan. Serta, memperkuat struktur ketahanan, kemandirian, dan daya saing BRI Life. "Terpisahnya unit syariah dari induk juga untuk menciptakan operasional bisnis yang lebih efektif dan efisien," imbuhnya.

Keputusan *spin-off* seiring dengan ekuitas unit syariah BRI Life yang mencapai Rp 232 milyar pada akhir 2023. Angka itu melampaui syarat OJK mengenai nilai ekuitas minimal pada 2026 sebesar Rp 100 milyar sehingga, aksi korporasi harus dilakukan.

Mengutip data OJK dan ASEAN Insurance Surveil-



Aris Hartanto

lance Report 2022, penetrasi asuransi di Indonesia masih 2,7 persen. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Singapura sebesar 12,5 persen; Malaysia dengan 3,8 persen; dan Thailand 4,6 persen. Rendahnya penetrasi itu memengaruhi kinerja unit syariah.

Meskipun demikian, Aris meyakini penetrasi asuransi syariah di Indonesia memiliki prospek yang menjanjikan. Hal itu seiring negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar. Ditambah, dalam beberapa waktu terakhir, terjadi peningkatan halal *awareness* syariah di kelompok menengah dan generasi muda. Khususnya, milenial.

Terpisah, Ketua Dewan Komisiner OJK Mahendra Siregar menyatakan, total aset industri asuransi per Agustus 2024 mencapai Rp 1.132,49 triliun atau tumbuh 1,32 persen *year-on-year* (YoY). (han/dio)

Judul	Soal Pemenuhan Modal Minimum Asuransi, Asosiasi Menolak Menyerah di Awal
Nama Media	bisnis.com
Newstrend	Dampak POJK 23/2023
Halaman/URL	https://finansial.bisnis.com/read/20241021/215/1809495/soal-pemenuhan-modal-minimum-asuransi-asosiasi-menolak-menyerah-di-awal
Tanggal Berita	21/10/2024
Sentimen	positive

Soal Pemenuhan Modal Minimum Asuransi, Asosiasi Menolak Menyerah di Awal

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menolak melempar handuk putih alias menyerah di tengah tantangan industri harus mengejar waktu pemenuhan modal minimum.



Akbar Maulana al Ishaqi · Bisnis.com
Senin, 21 Oktober 2024 | 20:35

Share



Karyawan beraktivitas di dekat logo-logo perusahaan asuransi di kantor Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) di Jakarta, Rabu (5/1/2021). / Bisnis - Suselo Jati

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menolak melempar handuk putih alias menyerah di tengah tantangan industri **asuransi** harus mengejar waktu pemenuhan **modal minimum**.

Sesuai mandat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 23/2023, mulai 2026 nanti modal minimum yang harus dimiliki perusahaan asuransi sebesar Rp250 miliar, asuransi syariah Rp100 miliar, reasuransi Rp500 miliar, dan reasuransi syariah sebesar Rp200 miliar.

Judul	Generali Indonesia Gencar Promosikan Kesehatan di Ajang The Big Tour – Road to Borobudur Marathon 2024
Nama Media	keuangansyariah.mysharing.co
Newstrend	Generali Sponsori Borobudur Marathon
Halaman/URL	https://keuangansyariah.mysharing.co/generali-indonesia-gencar-promosikan-kesehatan-di-ajang-the-big-tour-road-to-borobudur-marathon-2024/
Tanggal Berita	21/10/2024
Sentimen	positive



Bank Syariah - Keuangan Syariah - 17 hours ago

Generali Indonesia Gencar Promosikan Kesehatan di Ajang The Big Tour – Road to Borobudur Marathon 2024

Untuk ketujuh kalinya, Generali Indonesia resmi menjadi official insurance partner Borobudur Marathon yang sudah diumumkan Mei 2024 lalu.

Yogyakarta, MySharing – Kolaborasi PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) bersama Borobudur Marathon untuk terus mempromosikan gaya hidup sehat ke masyarakat terus berjalan di tahun ini. Generali Indonesia untuk yang ketujuh kalinya resmi menjadi *official insurance partner* Borobudur Marathon.

Menuju puncak acara, bersama tim Borobudur Marathon, Generali Indonesia juga hadir menyapa para komunitas lari dalam acara *The Big Tour Road to Borobudur Marathon 2024* yang diselenggarakan pada Minggu, 20 Oktober 2024 di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta.

Judul	BCA Life Sebut Penguatan Kanal Digital Dapat Meningkatkan Penetrasi Industri Asuransi
Nama Media	kontan.co.id
Newstrend	Strategi Bisnis BCA life
Halaman/URL	https://keuangan.kontan.co.id/news/bca-life-sebut-penguatan-kanal-digital-dapat-meningkatkan-penetrasi-industri-asuransi
Tanggal Berita	21/10/2024
Sentimen	positive

BCA Life Sebut Penguatan Kanal Digital Dapat Meningkatkan Penetrasi Industri Asuransi

Senin, 21 Oktober 2024 / 21:23 WIB



ILUSTRASI: BCA Life menilai bahwa penguatan kanal digital dapat meningkatkan penetrasi industri asuransi jiwa.

Reporter: Nadya Zahira | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat bahwa per semester I-2024 penetrasi industri asuransi jiwa mencapai 0,8% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara berdasarkan jangkauannya, penetrasi asuransi jiwa baru mencapai 6,6% dari populasi.

Menanggapi hal ini, perusahaan asuransi jiwa, BCA Life menilai bahwa penguatan kanal digital dapat meningkatkan penetrasi industri asuransi jiwa.

Judul	Langkah Strategis Indonesia Re di Tahun 2025, dari Restrukturisasi hingga Digitalisasi
Nama Media	jppn.com
Newstrend	Strategi Bisnis Indonesia Re
Halaman/URL	https://www.jppn.com/news/langkah-strategis-indonesia-re-di-tahun-2025-dari-restrukturisasi-hingga-digitalisasi
Tanggal Berita	21/10/2024
Sentimen	positive

Langkah Strategis Indonesia Re di Tahun 2025, dari Restrukturisasi hingga Digitalisasi

SenIn, 21 Oktober 2024 - 11:32 WIB



Indonesia Re turut berpartisipasi dalam kegiatan 28th Indonesia Rendezvous yang diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Foto: Indonesia Re

jppn.com, NUSA DUA - PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau **Indonesia Re**, perusahaan reasuransi terkemuka di Indonesia turut berpartisipasi dalam kegiatan 28th Indonesia Rendezvous yang diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI).

Acara ini merupakan salah satu platform strategis pertemuan para pelaku Industri Asuransi & Reasuransi Umum berskala global, sekaligus untuk membahas perkembangan terbaru di industri perasuransian serta menjalin kemitraan yang lebih kuat.

Judul	Mengoptimalkan Potensi Bonus Demografi, Gen Z Harus Mewaspadaai Bahaya Pinjaman Online dan Judi Online
Nama Media	wartaekonomi.co.id
Newstrend	TJSL Sequis
Halaman/URL	https://wartaekonomi.co.id/read547320/mengoptimalkan-potensi-bonus-demografi-gen-z-harus-mewaspadaai-bahaya-pinjaman-online-dan-judi-online
Tanggal Berita	21/10/2024
Sentimen	positive

Mengoptimalkan Potensi Bonus Demografi, Gen Z Harus Mewaspadaai Bahaya Pinjaman Online dan Judi Online

Serini, 21 Oktober 2024, 15:11 WIB



Kredit Foto: Unsplash/Rendy Novantino

Warta Ekonomi, Jakarta - Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Pada tahun itu, sekitar 70% jumlah penduduk Indonesia akan terhitung dalam usia produktif, yaitu 15-64 tahun.

Faculty Head Sequis Quality Empowerment, STAE, Yan Ardianto Handoyo, AWP, RFP, mengingatkan ancaman finansial bagi gen Z di balik maraknya penawaran pinjaman *online* (pinjol) dan iklan promosi judi *online* (judol).

Judul	PFI Mega Life Insurance Bakal Spin Off Unit Usaha Syariah
Nama Media	swa.co.id
Newstrend	Spin Off UUS PFI Mega Life Insurance
Halaman/URL	https://swa.co.id/read/452153/pfi-mega-life-insurance-bakal-spin-off-unit-usaha-syariah
Tanggal Berita	21/10/2024
Sentimen	positive

PFI Mega Life Insurance Bakal Spin Off Unit Usaha Syariah

21 Oktober 2024, 18:53 WIB

Tim Redaksi



Foto : Ilustrasi

PT PFI Mega Life Insurance berkomitmen untuk mewujudkan misi melindungi setiap impian orang Indonesia melalui kesejahteraan keuangan. Dalam rangka meningkatkan jangkauan produk dan layanan berbasis Syariah, perusahaan berencana untuk melakukan pemisahan unit usaha Syariah (*spin off*) dan mendirikan Perusahaan Asuransi Syariah baru.